

## **ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PEMELIHARAAN TERHADAP PENINGKATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PRASARANA JALAN DI BANDAR LAMPUNG**

**Tedy Murtejo**

*Staff Pengajar Teknik Sipil,*

*Fakultas Teknik Universitas Lampung*

*Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro no. 1. Bandar Lampung*

*surattedy@yahoo.co.id*

### **ABSTRAK**

Dalam perspektif kewilayahan, jalan memungkinkan terjadinya pergerakan atau mobilitas sumberdaya yang diperlukan oleh kegiatan ekonomi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jalan, maka kinerja jaringan jalan haruslah baik pula. Untuk itu diperlukan biaya pemeliharaan jaringan jalan yang mencukupi serta dapat digunakan secara efisien. Kinerja jaringan jalan dapat diukur dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa variabel yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menentukan pengaruh biaya pemeliharaan jalan terhadap pemenuhan SPM jalan di kota Bandar Lampung dan menentukan penanganannya berdasarkan kondisi ruas jalan yang ada saat ini. Berdasarkan hasil penelitian pencapaian SPM jaringan jalan di kota Bandar Lampung, indeks aksesibilitas sebesar = 5,05 sudah memenuhi, indeks mobilitas sebesar = 1,225 masih di bawah persyaratan SPM, sedangkan pencapaian SPM untuk ruas jalan berdasarkan persyaratan IRI, terdapat 10,99km (46,79%) jalan provinsi yang sudah memenuhi SPM dan 31,90km (58,38 %) jalan nasional yang masih di bawah SPM. Untuk persyaratan lebar jalan, terdapat 18,33 km (47,57 %) jalan provinsi dan 29,2 km (53,39 %) jalan nasional yang masih dibawah SPM. Pemenuhan SPM untuk ruas Jalan diperlukan penanganan perkerasan melalui program pemeliharaan berkala/periodik, sepanjang = 4.85 km dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 4.854.850.000.00,- dan penanganan perkerasan melalui program peningkatan jalan (pelebaran jalan), sepanjang = 47,52 km dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 77.343.944.500.00,-. Dengan Indeks aksesibilitas, maka kebutuhan suplai jaringan jalan sangat tergantung dari *setting* tata ruang wilayah, sehingga penyediaan dokumen RTRW menjadi sangat penting keberadaan, kesesuaian, dan kebenarannya. Spektrum kondisi geografi, demografi, ekonomi, dan kemampuan keuangan daerah merupakan variabel penentu dalam melakukan *setting* target pencapaian SPM di setiap wilayah. Adapun alokasi dana untuk pencapaian SPM dibutuhkan penanganan jalan nasional dan jalan provinsi di kota Bandar Lampung sepanjang = 93,52 km dengan anggaran biaya sebesar Rp 132.366.069.500.00,-

Kata kunci : kebutuhan biaya, jaringan jalan, peningkatan SPM

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibu Kota provinsi Lampung ini berada di teluk Lampung yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera. Dalam perspektif kewilayahan, jalan memungkinkan terjadinya pergerakan atau mobilitas sumberdaya yang diperlukan oleh kegiatan ekonomi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jalan, maka kinerja jaringan jalan haruslah baik pula. Untuk itu diperlukan biaya pemeliharaan jaringan jalan yang mencukupi serta dapat digunakan secara efisien. Kinerja jaringan jalan dapat diukur dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa variabel yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang jalan.

Dalam hal Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang jalan, besaran-besarnya telah tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum. Di mana pada bidang pelayanan prasarana jalan wilayah terdapat 5 aspek pelayanan yang ditetapkan SPM-nya yakni 3 aspek terkait penyediaan jaringan jalan (aksesibilitas, mobilitas, dan kecelakaan) dan 2 aspek terkait dengan penyediaan ruas jalan (kondisi jalan dan kondisi pelayanan). Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dengan luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, di mana sebagian besar pergerakan masyarakat Provinsi Lampung berada di kota ini. Oleh karena itu, Kota Bandar Lampung diperlukan adanya kajian mendalam

Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk jalan, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat akan akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi. Kebutuhan penyediaan jaringan jalan di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya intensitas dan distribusi populasi, jenis dan skala kegiatan ekonomi, dan konfigurasi tata ruang wilayah, dan lain-lain.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- Menganalisa tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan di kota Bandar Lampung.
- Menentukan kebutuhan penanganan ruas jalan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan kondisi eksisting dan alokasi anggaran pemeliharaan jalan

### Batasan Masalah

Secara umum batasan penelitian ini meliputi :

- Kondisi jalan yang ditinjau terhadap pemenuhan SPM jaringan jalan meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota di kota Bandar Lampung.
- Besaran Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Keputusan Menteri Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum.
- Alokasi anggaran pemeliharaan jalan pada tahun 2009
- Pembahasan kondisi jalan berdasarkan analisis data yang semaksimal mungkin didapat dari data sekunder.

## 2. PENGERTIAN UMUM SPM

### Definisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prasarana Jalan

Kata SPM secara umum dimunculkan dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom bahwa, "Pemerintah menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (2) UU No. 22 Tahun 1999". Pasal 11 (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang dimaksud dalam PP tersebut menyatakan bahwa, "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja". Dan juga dalam pasal 3 ayat 3 PP tersebut dinyatakan, "Daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)". Dengan merujuk kepada definisi-definisi di atas maka SPM prasarana jalan dapat diterjemahkan sebagai berikut: *SPM Prasarana Jalan adalah suatu spesifikasi teknis penyediaan prasarana jalan yang sekurang-kurangnya disediakan pada suatu wilayah untuk keperluan lalu lintas agar fungsi dari jaringan jalan dalam memberikan dukungan pelayanan bagi kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.*

### Parameter Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan prasarana jalan wilayah di Indonesia terbagi atas SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan. Parameter kinerja SPM Jaringan Jalan, antara lain yaitu :

- Aspek aksesibilitas, dengan indikator "tersedianya jaringan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat". Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus : panjang jalan/ luas wilayah ( $\text{km}/\text{km}^2$ ), sedangkan besaran parameter kinerja SPM untuk indeks aksesibilitas terbagi atas tingkat pelayanannya yang didasarkan pada kepadatan penduduk ( $\text{jiwa}/\text{km}^2$ ) dengan nilai dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Besaran Parameter Kinerja SPM Untuk Indeks Aksesibilitas

Kepadatan Penduduk ( $\text{jiwa}/\text{km}^2$ )		Nilai Indeks Aksesibilitas
Kategori	Besaran	
Sangat tinggi	> 5.000	> 5,00
Tinggi	> 1.000	> 1,50
Sedang	> 500	> 0,50
Rendah	> 100	> 0,15
Sangat rendah	< 100	> 0,05

Sumber : Kepmenkimpraswil no. 534/KPTS/M/2001

- Aspek mobilitas, dengan indikator "tersedianya jaringan jalan yang dapat menampung mobilitas masyarakat". Nilai indeks mobilitas dihitung dengan rumus : panjang jalan/1000 penduduk ( $\text{km}/1000$  penduduk), sedangkan besaran parameter kinerja SPM untuk indeks mobilitas terbagi atas tingkat pelayanannya yang didasarkan pada PDRB perkapita ( $\text{juta Rp./tahun}$ ) dengan nilai dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Parameter Kinerja SPM untuk Indeks Mobilitas

PDRB per-kapita (juta Rp./Kap/Thn)		Nilai Indeks Mobilitas
Kategori	Besaran	
Sangat tinggi	> 10	> 5,00
Tinggi	> 5	> 2,00
Sedang	> 2	> 1,00
Rendah	> 1	> 0,50
Sangat rendah	< 1	> 0,20

Sumber : Kepmenkimpraswil no. 534/KPTS/M/2001

- Aspek kecelakaan, dengan indikator “tersedianya jaringan jalan yang dapat melayani pemakai jalan dengan aman”. Nilai indeks kecelakaan 1 dihitung berdasarkan : kecelakaan /100000 km kendaraan, untuk nilai indeks kecelakaan 2 berdasarkan : kecelakaan/km/tahun.

Untuk SPM ruas jalan terbagi atas :

- Kondisi jalan, dengan indikator “tersedianya ruas jalan yang dapat memberikan kenyamanan pemakai jalan”. Nilai indeks kondisi jalan didasarkan pada nilai IRI/RCI masing-masing ruas jalan, sedangkan besaran parameter kinerja SPM untuk kondisi jalan terbagi atas cakupan lebar minimum jalan dan tingkat pelayanannya pada volume lalu-lintas (LHR) dengan nilai dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Parameter Kinerja SPM Untuk Kondisi Jalan Menurut Fungsi Jalan

Fungsi Jalan	Lebar Minimal (PP No. 34/2006 Jalan)	Minimal Volume Lalulintas Jam Puncak (MKJI 1997) smp/jam	LHR = VJP/k (MKJI 1997) smp/hari	Syarat Minimal IRI & RCI Jalan (Kepmenkimpraswil No. 543/KPTS/M/2001)
Arteri Primer	11 m	Diatas 450	Diatas 4100	IRI<8,0 dan RCI>5,5
Kolektor Primer	9 m	300-350	2750-3250	IRI<8,0 dan RCI>5,5
Lokal Primer	7,5 m	200-250	1750-2250	IRI<8,0 dan RCI>5,5
Arteri Sekunder	11 m	Diatas 500	Diatas 5500	IRI<8,0 dan RCI>5,5
Kolektor Sekunder	9 m	300-350	3250-4000	IRI<8,0 dan RCI>5,5
Lokal Sekunder	7,5 m	150-200	1500-2250	IRI<8,0 dan RCI>5,5

Sumber : Kepmenkimpraswil no. 534/KPTS/M/2001

- Kondisi pelayanan, dengan indikator “tersedianya ruas jalan yang dapat memberikan kelancaran pemakai jalan”. Nilai indeks kondisi pelayanan didasarkan pada kecepatan tempuh minimum pada masing-masing ruas jalan, sedangkan standar besaran parameter kinerja SPM untuk kondisi pelayanan didasarkan pada fungsi ruas jalan dengan nilai dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Standar Besaran Parameter Kinerja SPM untuk Kondisi Pelayanan pada Fungsi Ruas Jalan

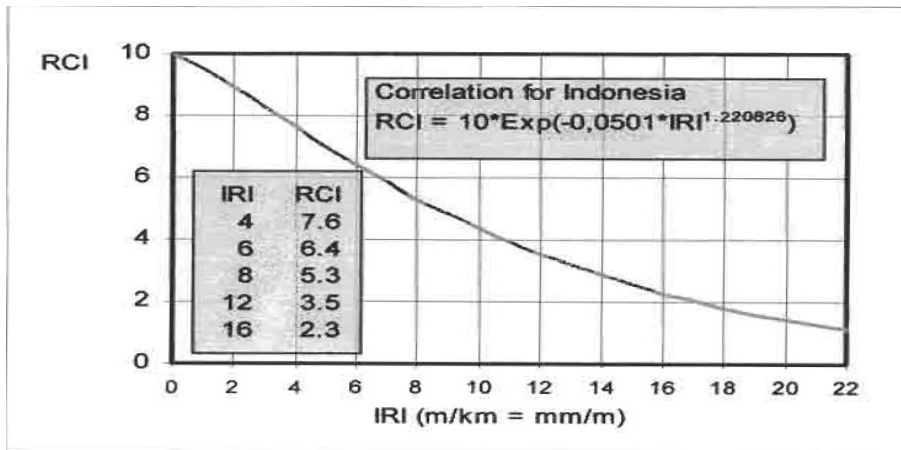
Fungsi jalan		Kecepatan tempuh minimal
Arteri primer (AP)	Lalin reg jarak jauh	> 25 km/jam
Kolektor primer (KP)	Lalin reg jarak sedang	> 20 km/jam
Lokal primer (LP)	Lalin reg jarak dekat	> 20 km/jam
Arteri sekunder (AS)	Lalin kota jarak jauh	> 25 km/jam
Kolektor sekunder (KS)	Lalin kota jarak sedang	> 20 km/jam
Lokal sekunder (LS)	Lalin kota jarak dekat	> 20 km/jam

Sumber : Kepmenkimpraswil no. 534/KPTS/M/2001

### Target SPM; Nilai yang Diinginkan (*Desirable Level*) atau Nilai Kritis (*Critical Level*)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) prasarana jalan menurut Undang-Undang, terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan. Sedangkan untuk ruas jalan (individual) standar pelayanan minimal terdiri dari 2 bidang, yaitu :

- Kondisi jalan (kualitas fisik jalan), dimana yang umum digunakan dalam menilai kondisi ruas jalan adalah berdasarkan nilai kerataan permukaan yaitu IRI (*International Roughness Index*) yang menyangkut *riding-quality* atau RCI (*Road condition Index*) yang menyangkut *structural-quality*. Hubungan antara IRI dan nilai RCI sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

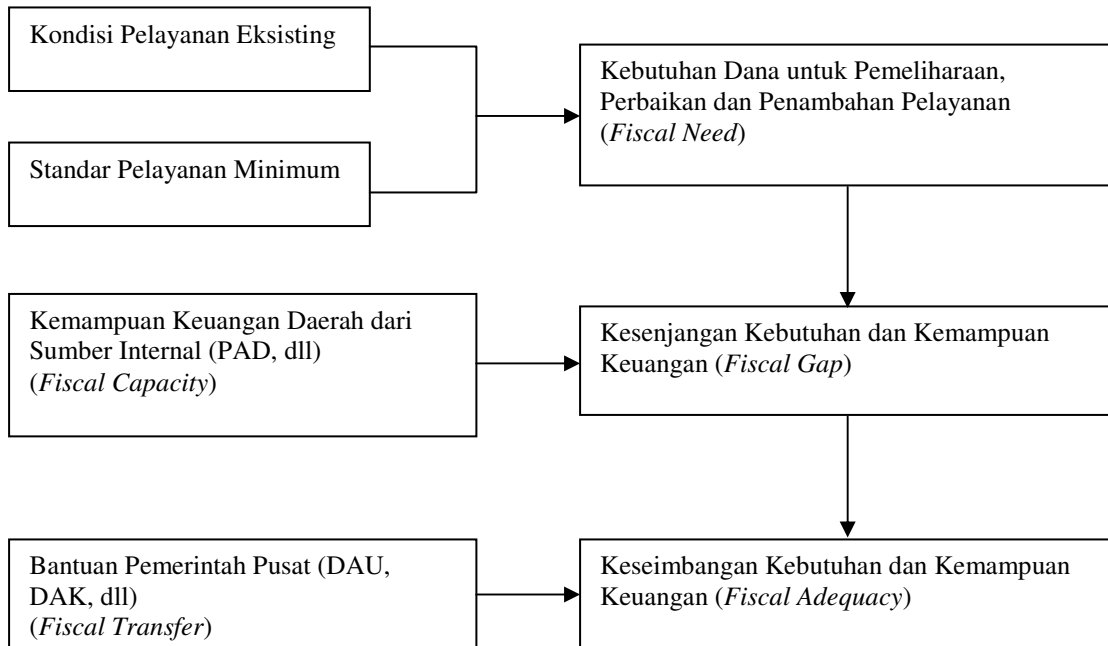


Gambar 1. Hubungan Nilai IRI dan RCI

- Kondisi pelayanan jalan (kualitas pelayanan/operasional), yang umumnya diindikasikan oleh tingkat pelayanan jalan sesuai dengan kecepatan tempuh yang dihasilkan sebagai perbandingan antara kapasitas jalan dengan volume lalu-lintas. Contoh pengukuran kualitas pelayanan jalan juga disampaikan oleh Morlok (1985) yang terdiri dari 6 tingkatan A, B, C, D, E, dan F..

**SPM Dalam Konteks Pendanaan Prasarana Jalan di Era Otonomi Daerah**

Dalam sudut pandang pendanaan jalan di era otonomi daerah, SPM diperlukan sebagai tolok ukur untuk menentukan beban daerah dalam menyelenggarakan jalan untuk memenuhi batas minimal kuantitas dan kualitas jalan sesuai kondisi geografi, ekonomi, dan demografi setempat. Sehingga dengan mencocokkan antara kebutuhan penanganan jalan untuk memenuhi SPM (*fiscal need*) dengan kapasitas/kemampuan keuangan daerah (*fiscal capacity*) akan dapat ditentukan seberapa besar kesenjangan kebutuhan dana (*fiscal gap*) untuk penanganan jalan yang idealnya diberikan oleh pusat (atau dapat dicari dari sumber dana lainnya). SPM (baik untuk prasarana jalan maupun jenis pelayanan masyarakat lainnya) pada dasarnya merupakan alat ukur dalam menentukan besarnya transfer dana dari Pusat ke Daerah, baik melalui DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun melalui mekanisme lainnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 2.

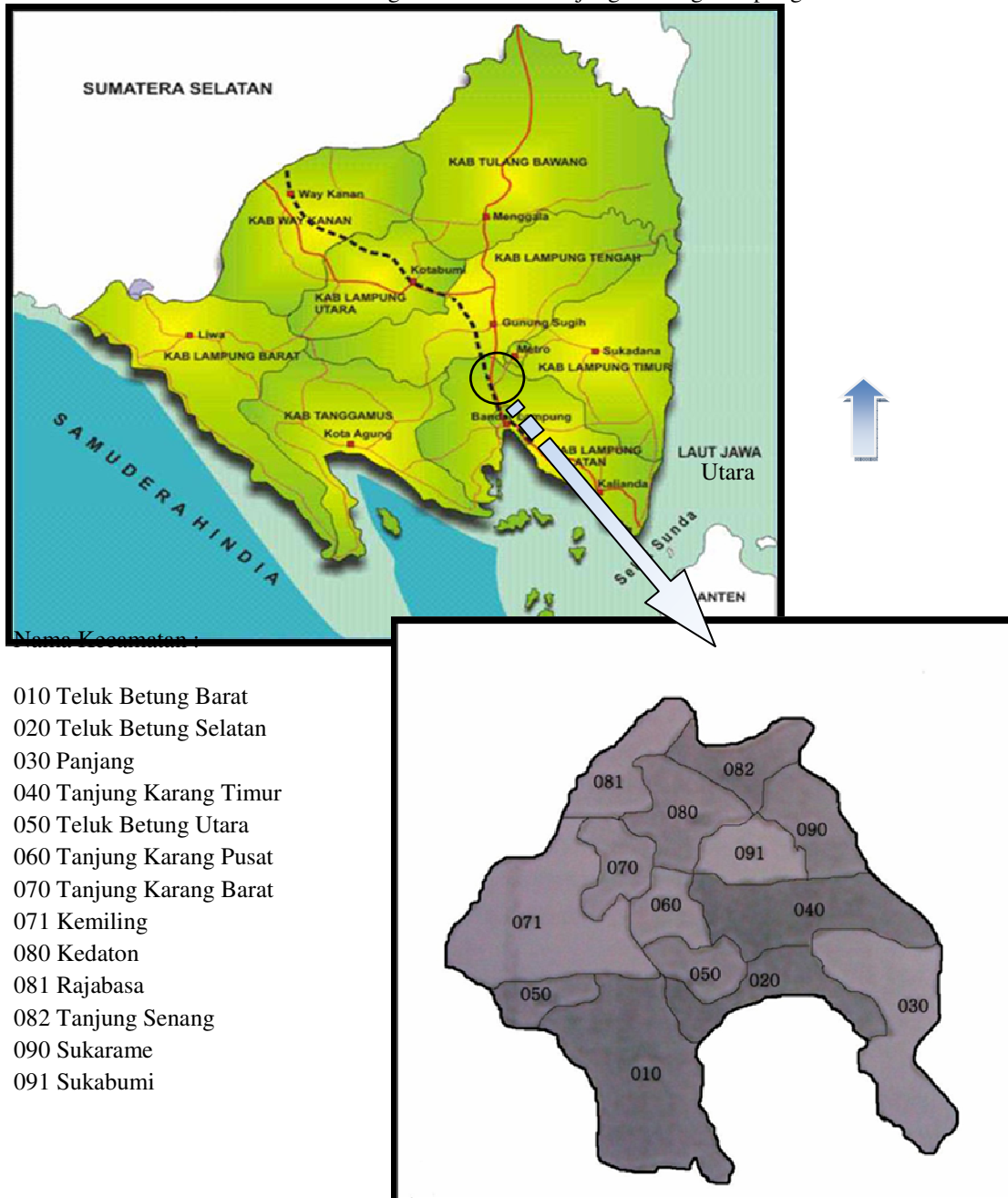


Gambar 2. SPM dalam Pendanaan Pelayanan di Era Otonomi

### 3. METODOLOGI.

Penelitian ini dilakukan pada data tahun 2009 dan membagi obyek penelitian secara administratif kota Bandar Lampung berdasarkan basis data kecamatan (simarmata, 2009) dan (murtejo, 2005), yang dibatasi oleh :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung selatan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Padang Cermin dan kecamatan Ketibung kabupaten Pesawaran serta Teluk Lampung.
3. Sebelah barat berbatsan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.



Gambar 3. Letak Geografis dan Pembagian berdasarkan kecamatan di Kota Bandar Lampung

Adapun untuk keperluan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis datanya dilakukan mengikuti tahapan yang tertera pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Analisis Pencapaian SPM Jalan Di Kota Bandar Lampung

NO	JENIS DATA	SUMBER DATA	KEGUNAAN DATA
1.	Data inventory jalan: a. Panjang dan lebar jalan b. Peran dan Fungsi jalan	Dinas Bina Marga dan Permukiman Kota Bandar Lampung	- Analisa terhadap pemenuhan SPM jaringan jalan aspek aksesibilitas dan aspek mobilitas - Identifikasi cakupan kuantitas satndar pelayanan untuk lebar minimum jalan sesuai LHR. - Identifikasi kualitas standar pelayanan untuk kecepatan tempuh minimum sesuai dengan peran dan fungsi jalan.
2	Data kondisi jalan kota Bandar Lampung : a. Nilai IRI ruas jalan b. Kecepatan/waktu tempuh c. Data kecelakaan	Dinas Bina Marga dan Permukiman Kota Bandar Lampung  Poltabes Kota Bandar Lampung	- Analisa terhadap pemenuhan SPM ruas jalan (kondisi jalan) - Analisa terhadap pemenuhan SPM ruas jalan (kondisi pelayanan) - Analisa terhadap pemenuhan SPM jaringan jalan aspek kecelakaan
3.	Data luas wilayah administrasi kecamatan dikota Bandar Lampung	BPS ( Kota Bandar Lampung Dalam Angka)	- Analisa terhadap pemenuhan SPM jaringan jalan aspek aksesibilitas dan mobilitas.
4.	Data sosio ekonomi : a. Jumlah dan penyebaran pndduk b. PDRB perkapita	BPS ( Kota Bandar Lampung Dalam Angka) BPS ( Kota Bandar Lampung Dalam Angka)	- Identifikasi kuantitas tingkat pelayanan kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) - Identifikasi kuantitas tingkat pelayanan PDRB perkapita (juta Rp./kapita/tahun)
5	Jaringan jalan a Kondisi fisik ruas jalan b Lalu lintas ruas jalan c Hirarki jalan	- IRMS - Leger Jalan - Data Induk Jaringan	- Deskripsi penyediaan prasarana jalan eksisting - Penyusunan <i>database</i> sistem jaringan jalan - Analisis korelasi prasarana jalan dan sosek wilayah
6	Tata ruang eksisting & rencana: a Penggunaan ruang b Pola dan intensitas kegiatan c Kawasan andalan/prioritas d Struktur sistem kota	- RTRWN - RTRWP Wilayah studi	- Identifikasi korelasi sistem hirarki jaringan jalan dengan tata ruang - Identifikasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan jalan
7	Sistem pengelolaan jalan: a Mekanisme pembinaan b Sistem pendanaan	- Instansi terkait - Wawancara - Studi terdahulu	- Identifikasi sinkronisasi SPM dengan sistem manajemen jalan - Identifikasi kapasitas pendanaan

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Indeks Aksesibilitas

Dari table 6. terlihat bahwa dari sisi kuantitas penyediaan jaringan jalan di kota Bandar Lampung sudah memenuhi SPM (indeks aksesibilitas eksisting = 5.05 > 1,5), sedangkan untuk kecamatan menunjukkan 1 kecamatan yang masih memiliki indeks aksesibilitas di bawah SPM.

Tabel 6. Analisis Pencapaian SPM Jaringan Jalan Untuk Indeks Aksesibilitas

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk/ Km <sup>2</sup>	Panjang Jalan(Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km2)		M/TM
					Eksist.	Syarat	
1	Teluk Betung Barat	20,99	2.563	86,610	4,13	> 1,5	M
2	Teluk Betung Selatan	10,07	10.808	44,913	4,46	> 5,0	TM
3	Panjang	21,16	2.920	66,904	3,16	> 1,5	M
4	Tanjung Karang Timur	21,11	3.900	82,601	3,91	> 1,5	M
5	Teluk Betung Utara	10,38	6.306	82,610	7,96	> 5,0	M
6	Tanjung Karang Pusat	6,68	11.986	38,281	5,73	> 5,0	M
7	Tanjung Karang Barat	15,14	3.505	83,981	5,55	> 1,5	M
8	Kemiling	27,65	1.899	82,308	2,98	> 1,5	M
9	Kedaton	10,88	8.145	108,635	9,98	> 5,0	M
10	Rajabasa	13,02	2.455	65,619	5,04	> 1,5	M
11	Tanjung Senang	11,63	2.482	64,555	5,55	> 1,5	M
12	Sukarame	16,87	3.181	95,400	5,66	> 1,5	M
13	Sukabumi	11,64	4.397	92,834	7,98	> 1,5	M
	<b>Bandar Lampung</b>	<b>197,22</b>	<b>4.118</b>	<b>995,250</b>	<b>5,05</b>	<b>&gt; 1,5</b>	<b>M</b>

### Indeks Mobilitas

Dalam analisis untuk mengetahui pencapaian standar SPM indeks mobilitas per kecamatan digunakan PDRB perkapita kota Bandar Lampung. Kebutuhan penambahan jaringan jalan untuk memenuhi standar SPM jaringan indeks mobilitas berjumlah > 637,52 km dengan perincian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Pencapaian SPM Jaringan Jalan Untuk Indeks Mobilitas

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (Rp/Th)	Panjang Jalan (Km)	Indeks Mobilitas (Km/1000 pdd)		M/TM
					Eksist	syarat	
1	Teluk Betung Barat	53.790	6.688.862	86,610	1,610	> 2	TM
2	Teluk Betung Selatan	108.836	6.688.862	44,913	0,413	> 2	TM
3	Panjang	61.794	6.688.862	66,904	1,083	> 2	TM
4	Tanjung Karang Timur	82.331	6.688.862	82,601	1,003	> 2	TM
5	Teluk Betung Utara	65.458	6.688.862	82,610	1,262	> 2	TM
6	Tanjung Karang Pusat	80.067	6.688.862	38,281	0,478	> 2	TM
7	Tanjung Karang Barat	53.062	6.688.862	83,981	1,583	> 2	TM
8	Kemiling	52.499	6.688.862	82,308	1,568	> 2	TM
9	Kedaton	88.620	6.688.862	108,635	1,226	> 2	TM
10	Rajabasa	31.968	6.688.862	65,619	2,053	> 2	M
11	Tanjung Senang	28.865	6.688.862	64,555	2,236	> 2	M
12	Sukarame	53.659	6.688.862	95,400	1,778	> 2	TM
13	Sukabumi	51.184	6.688.862	92,834	1,814	> 2	TM
	<b>Bandar Lampung</b>	<b>812.133</b>	<b>6.688.862</b>	<b>995,250</b>	<b>1,225</b>	<b>&gt; 2</b>	<b>TM</b>

Keterangan: M= Memenuhi; TM= tidak memenuhi

### Indeks Kecelakaan

Berdasarkan data kecelakaan yang bersumber dari Poltabes Bandar Lampung di mana kecamatan Tanjung Karang Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Pusat berada dalam 1 wilayah hukum, begitu pula kecamatan Kedaton Dan Tanjung Senang, serta Sukarame dan Sukabumi, maka analisis pencapaian nilai indeks kecelakaan di masing-masing kecamatan tersebut digabung. Tabel 8. menyajikan pencapaian nilai indeks kecelakaan di setiap kecamatan di kota Bandar Lampung yang memperlihatkan indeks kecelakaan di kota Bandar Lampung mencapai nilai 0,86. Dari seluruh kecamatan dan gabungan kecamatan di kota Bandar Lampung kecamatan Raja Basa merupakan yang memiliki indeks kecelakaan paling besar yakni 1,46.

Tabel 8. Analisis Pencapaian SPM Jaringan Untuk Indeks Kecelakaan

No	Kecamatan	Jumlah Kecelakaan Per Tahun	Kepadatan Penduduk/ Km <sup>2</sup>	Panjang Jalan (Km)	Indeks Kecelakaan (Kec./Km/Tahun)
1	Teluk Betung Barat	26,00	2.563	44,846	0,58
2	Teluk Betung Selatan	138,00	10.808	92,209	1,50
3	Panjang	69,00	2.920	94,798	0,73
4	Tanjung Karang Timur	75,00	3.900	90,708	0,83
5	Teluk Betung Utara	91,00	6.306	84,069	1,08
6	Tanjung Karang Barat + Kemiling + Tanjung Karang Pusat	190,00	17.390	157,169	1,21
7	Kedaton + Tanjung Senang	70,00	10.627	247,702	0,28
8	Rajabasa	111,00	2.455	76,135	1,46
9	Sukarame + Sukabumi	85,00	7.578	106,124	0,80
	<b>Kota Bandar Lampung</b>	<b>855,00</b>	<b>4.118</b>	<b>993,760</b>	<b>0,86</b>

### Indeks Kondisi Jalan

Ruas - ruas jalan nasional dalam kota ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kimpraswil No.376//KPTS/M/2004, dan untuk ruas – ruas jalan provinsi dalam kota ditetapkan berdasarkan SK. MENDAGRI Dan OTDA No.55 Tahun 2000. Ruas – ruas jalan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan data-data dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan (P2JJ) Provinsi Lampung, dan Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dari Tabel 9 terlihat bahwa untuk jalan nasional maupun jalan provinsi masih terdapat ruas jalan yang belum memenuhi SPM, baik dari aspek lebar, kecepatan, maupun dari kondisi perkerasan berdasarkan nilai IRI. Pencapaian SPM ruas jalan untuk indeks kondisi jalan adalah :

- Berdasarkan Nilai IRI untuk Jalan Nasional  
Dari 10 ruas jalan nasional dengan panjang = 54,69 km, terdapat 4 ruas sepanjang = 31,90 km (58,33%) dengan nilai IRI tidak memenuhi persyaratan SPM ( $\geq 6$  m/km), sedangkan sisanya 6 ruas dengan panjang 22,79 km (41,67%) memenuhi persyaratan SPM ( $< 6$  m/km) atau dalam kondisi sedang. Untuk total ruas jalan nasional dengan LHR rata-rata = 25510 smp dan nilai IRI rata-rata = 5,725 m/km ( $< 6$  m/km) memenuhi persyaratan SPM.
- Berdasarkan nilai IRI untuk jalan Provinsi  
Dari 4 ruas jalan provinsi dengan panjang = 23,49 km, terdapat 3 ruas sepanjang 10,99 km (46,79%) dengan nilai IRI tidak memenuhi persyaratan SPM ( $\geq 6$  m/km dan  $\geq 8$  m/km), sedangkan sisanya 1 ruas dengan panjang 12,5 km (53,21%) memenuhi persyaratan SPM ( $< 8$  m/km) atau dalam kondisi baik dan sedang. Untuk total 4 ruas jalan provinsi dengan LHR rata-rata = 8039 smp dan nilai IRI rata-rata = 7,78 m/km ( $< 6$  m/km) tidak memenuhi persyaratan SPM
- Berdasarkan lebar jalan untuk jalan Nasional  
Dari 10 ruas jalan nasional dengan panjang = 54,69 km, terdapat 4 ruas sepanjang = 29,2 km (53,39%) dengan lebar di bawah persyaratan SPM (kurang lebar 2,00 – 7,00 m), sedangkan sisanya 6 ruas sepanjang = 25,49 km (46,61%) dengan lebar masih di atas persyaratan SPM. Untuk total jalan provinsi dengan LHR rata-rata = 25510 smp dan lebar rata-rata = 8,9 m ( $< 14$  m), tidak memenuhi persyaratan SPM.
- Berdasarkan lebar jalan untuk jalan Provinsi  
Dari 8 ruas jalan provinsi dengan panjang = 38,53 km, terdapat 18,33 km (47,57%) dengan lebar di bawah persyaratan SPM (kurang lebar 0,08 – 8,00 m), sedangkan sisanya 3 ruas sepanjang = 20,2 km (52,43%) dengan lebar masih di atas persyaratan SPM. Untuk total 8 ruas jalan provinsi dengan LHR rata-rata = 15531 smp dan lebar rata-rata = 6,97 m ( $> 7$  m), tidak memenuhi persyaratan SPM.

### Alokasi Dana Untuk Kebutuhan Penanganan Jalan Untuk Pemenuhan SPM

Untuk dapat memenuhi persyaratan SPM, maka perlu ada penanganan terhadap jalan eksisting yang masih di bawah persyaratan SPM, yang pada dasarnya merupakan alat ukur dalam menentukan besarnya transfer dana dari Pusat ke Daerah, baik melalui DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun melalui mekanisme lainnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 10. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kebutuhan penanganan biaya dalam rangka pemenuhan SPM untuk jalan nasional dan jalan provinsi apabila dikelompokkan atas jenis penanganannya adalah sebagai berikut :

- Penanganan perkerasan melalui program pemeliharaan rutin, sepanjang = 93,52 km dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 50.167.275.000.00.-
- Penanganan perkerasan melalui program pemeliharaan berkala/periodik, sepanjang = 4,85 km dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 4.854.850.000.00.-
- Penanganan perkerasan melalui program peningkatan jalan (pelebaran jalan), sepanjang = 47,52 km dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 77.343.944.500.00.-

Kebutuhan biaya untuk pemenuhan SPM jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 132.366.069.500.00.-

### 5. KESIMPULAN

- Indeks aksesibilitas di kota Bandar Lampung sebesar 5,046 sudah memenuhi persyaratan SPM (syarat  $> 1,5$ ) yakni 94,89% dari total wilayah kota Bandar Lampung, sedangkan untuk indeks mobilitas sebesar 1,225 masih di bawah persyaratan SPM (syarat  $> 2$ ) yakni 87,5% total wilayah, serta indeks kecelakaannya adalah 0,86
- Pencapaian SPM Ruas Jalan di kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa berdasarkan persyaratan IRI, masih terdapat jalan nasional sepanjang = 31,90 km (58,38%) dan, ruas jalan provinsi sepanjang = 23,47 km (46,79%) tidak memenuhi persyaratan SPM ( nilai IRI  $>$  yang disyaratkan). Sedangkan berdasarkan persyaratan lebar jalan, masih terdapat jalan nasional sepanjang = 29,2 km (53,39%) dan jalan provinsi sepanjang = 18,3 km (47,57%) di bawah persyaratan SPM.
- Untuk pemenuhan SPM Ruas Jalan di Kota Bandar Lampung, diperlukan penanganan sepanjang = 93,52 km, dengan kebutuhan Alokasi dan sebesar Rp. 132.366.069.500.00.-, yang terbagi dalam kelompok penanganan perkerasan melalui program pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala/ periodik, dan penanganan peningkatan jalan dalam hal ini pelebaran jalan.



Tabel 9. Analisis Pencapaian SPM Ruas Jalan Dan Kondisi Pelayanan

NO	NAMA RUAS	Tipe Jalan	Fungsi	Panjang (KM)	Lebar (M)	LHR	IRI (M/Km)	Kecepatan (Km/Jam)	Persyaratan			M/TM		
									Lebar	IRI	Kecepatan	Lebar	IRI	Kec.
<b>Jalan Nasional :</b>														
00111K	Jln. Teuku Umar	4/2 D	K 1	3,12	7 x 2	56.074	6,02	46	14	< 6	> 25 Km/Jam	M	TM	M
00112K	Jln. ZA. Pagar Alam	4/2 D	K 1	4,39	7 x 2	51.812	5,89	46	14	< 6	> 25 Km/Jam	M	M	M
02311K	Jln. Wolter Monginsidi	2/2 UD	K 1	3,23	7,00	10.165	4,83	36	7	< 6	> 25 Km/Jam	M	M	M
02312K	Jln. Kartini	4/1 UD	K 1	1,49	12,00	44.110	4,89	39	14	< 6	> 25 Km/Jam	TM	M	M
06011K	Jln. Yos Sudarso	4/2 UD	A	8,26	7 - 14	11.500	5,51	54	7	< 6	> 25 Km/Jam	M	M	M
06012K	Jln. Malahayati	4/1 UD	A	1,44	7,00	6.973	6,16	46	6	< 6	> 25 Km/Jam	M	TM	M
06013K	Jln. Ikan Tenggiri	2/2 UD	A	0,37	7,00	22.014	5,94	-	14	< 6	> 25 Km/Jam	TM	M	-
02111K	Jln. Soekarno - Hatta	2/2 UD	A	20,36	7,00	22.955	6,04	-	14	< 6	> 25 Km/Jam	TM	TM	-
02221K	Jln. Letjen Alamsyah RPN.	2/2 UD	A	5,06	7,00	8.010	5,84	-	7	< 6	> 25 Km/Jam	M	M	-
02313K	Jln. Imam Bonjol	2/2 UD	K1	6,98	7,00	21.482	6,13	44	14	< 6	> 25 Km/Jam	TM	TM	M
<b>Jalan Provinsi :</b>														
03113K	Jln. Laksamana Martadinata	2/2 UD	K1	12,5	6,00	4.710	4,10	-	6	< 8	> 20 Km/Jam	M	M	-
05511K	Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami	2/2 UD	K1	4,85	7,00	5.418	11,70	-	6	< 8	> 20 Km/Jam	M	TM	-
08011K	Jln. Letjen Ryacudu	2/2 UD	K1	3,27	6,00	15.229	7,80	-	7	< 6	> 20 Km/Jam	TM	TM	-
08001K	Sp. Korpri - Jatimulyo	2/2 UD	K1	2,87	5,50	6.798	7,50	-	7	< 6	> 20 Km/Jam	TM	TM	-
10711K	Jln. Pangeran Tirtayasa	2/2 UD	K1	6,66	6,00	16.442	-	-	7	< 6	> 20 Km/Jam	TM	-	-
10811K	Jln. Pramuka	2/2 UD	K1	4,01	6,20	11.287	-	39	7	< 6	> 20 Km/Jam	TM	-	M
11003K	Jln. Gajah Mada	2/2 UD	K1	1,52	6,00	40.192	-	33	14	< 6	> 20 Km/Jam	TM	-	M
11004K	Jln. Pangeran Antasari	4/2 UD	K1	2,85	14,00	24.174	-	44	14	< 6	> 20 Km/Jam	M	-	M
03112K	Jln. Ambon	2/2 UD	K1	0,3	6,00	-	-	-	-	-	> 20 Km/Jam	-	-	-

Tabel 10. Kebutuhan Penanganan Jalan untuk Pemenuhan SPM

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kurang Lebar (m)	Kondisi	Kebutuhan Penanganan Jalan (Rp)		
						Pemeliharaan Rutin	Pemeliharaan Berkala	Peningkatan
<b>JALAN NASIONAL</b>								
00111K	Jln. Teuku Umar	3,12	14,00	-	sedang	3.276.000.000.00	-	-
00112K	Jln. Zaenal Abidin Pagar Alam	4,39	14,00	-	sedang	4.609.500.000.00	-	-
02311K	Jln. Wolter Monginsidi	3,23	7,00	-	sedang	1.695.750.000.00	-	-
02312K	Jln. Kartini	1,49	12,00	(2.00)	sedang	1.341.000.000.00	-	1.017.670.000.00
06011K	Jln. Yos Sudarso	8,26	7,00	-	sedang	4.336.500.000.00	-	-
06012K	Jln. Malahayati	1,44	7,00	-	sedang	756.000.000.00	-	-
06013K	Jln. Ikan Tenggiri	0,37	7,00	(7.00)	sedang	194.250.000.00	-	884.485.000.00
02111K	Jln. Soekarno - Hatta	20,36	7,00	(7.00)	sedang	10.689.000.000.00	-	48.670.580.000.00
02221K	Jln. Letjen Alamsyah RPN	5,06	7,00	-	sedang	2.656.500.000.00	-	-
02313K	Jln. Imam Bonjol	6,97	7,00	(7.00)	sedang	3.659.250.000.00	-	16.661.785.000.00
<b>JALANPROVINSI</b>								
03112K	Jln. Laksamana Martadinata	12,5	6,00	-	sedang	5.625.000.000.00	-	-
05511K	Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami	4,85	7,00	-	rusak ringan	-	4.854.850.000.00	-
08011K	Jln. Letjen Ryacudu	3,27	6,00	(1.00)	sedang	1.471.500.000.00	-	1.116.705.000.00
08001K	Sp. Korpri - Jatimulyo	2,87	5,50	(1.50)	sedang	1.183.875.000.00	-	1.470.157.500.00
10711K	Jln. Pangeran Tirtayasa	6,66	6,00	(1.00)	-	2.997.000.000.00	-	2.274.390.000.00
10811K	Jln. Pramuka	4,01	6,20	(0.80)	-	1.864.650.000.00	-	1.095.532.000.00
11003K	Jln. Gajah Mada	1,52	6,00	(8.00)	-	684.000.000.00	-	4.152.640.000.00
11004K	Jln. Pangeran Antasari	2,85	14,00	-	-	2.992.500.000.00	-	-
03112K	Jln. Ambon	0,3	6,00	-	-	135.000.000.00	-	-
<b>Jumlah</b>						<b>50.167.275.000.00</b>	<b>4.854.850.000.00</b>	<b>77.343.944.500.00</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2000. PP No. 25 Tahun 2000
- \_\_\_\_\_, 2001, Kepmenkimpraswil No. 534/KPTS/M/2001
- \_\_\_\_\_, 2004, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
- \_\_\_\_\_, 2004, Panjang Jalan Provinsi SK Men. Kimpraswil No. 375/KPTS/M/2004,
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2008. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2008*. BPS Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota. 1990. *Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Di Wilayah Perkotaan*. Jakarta.
- Hermawan, Ebby. 2005. *Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Jalan Di Jawa Barat*. Tesis. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Morlok, E.K. 1985. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Erlangga. Jakarta
- Murtejo, Tedy. 2005. *Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jalan Di Daerah Provinsi Bandar Lampung*. Proceeding Satek II Unila, Bandar Lampung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta.
- Simarmata, Marudut. 2009 *Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Bandar Lampung*, skripsi, Universitas Lampung
- Sukirman, Silvia. 1992, *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Bandung.
- Tamin, Z. Ofyar. 2000. *Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi*. Edisi Kedua, ITB, Bandung.
- [www.fhwa.dot.gov](http://www.fhwa.dot.gov), Performance Plan for Fiscal Year 2001, Federal Highway Administration, US
- [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)., Proposed Performance Indicators For African Roads, SSATP-UNECA
- [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id), Kebijakan Dan Peraturan Departemen Pekerjaan Umum (Pusdata.pu).

**KoNTekS 4, UNUD-UAJY-UPH**  
**Sanur, 2-3 Juni 2010**